

BAB 1

PENDAHULUAN

Penulisan dalam tesis ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang gambaran secara singkat mengenai isi, tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, *literature review*, landasan teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan struktur pengorganisasian penulisan tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini banyak isu-isu global seputar politik dan keamanan masih merupakan ancaman nyata bagi suatu negara. Permasalahan mengenai isu-isu teritori (Laut Cina Selatan, Perairan Natuna), kecanggihan alat-alat pertahanan negara-negara sekitar yang terus berkembang masih menjadi faktor yang berpengaruh besar bagi suatu negara melakukan peningkatan pertahanan (*self deffance*). Indonesia termasuk salah satu negara yang mulai fokus memperkuat pertahanannya, terutama pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Di sini penulis akan membahas tentang alasan kebijakan pertahanan dijadikan prioritas utama di era kepemimpinan Jokowi. Prioritas kebijakan tersebut diambil karena memiliki dampak bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang strategis, luas, dan banyaknya wilayah teritori yang berbatasan langsung dengan negara-negara sekitar.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah cukup luas, kekayaan alam yang melimpah dan letak strategis sehingga menjadikannya sangat penting bagi negara-negara industri maju. Dengan menjadikan negara-negara tersebut maju maka ancaman dari luar yang mungkin akan berdampak terhadap negara Indonesia pun menjadi semakin besar. Isu-isu dari luar pun sering terjadi dengan negara Indonesia, seperti halnya pada konflik Laut Cina Selatan dan terdapat banyak kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna dengan waktu yang cukup lama yang mengharuskan Presiden RI Jokowi dengan didampingi para pemimpin Tentara Nasional Indonesia melakukan patroli atau terjun langsung ke lapangan mengawasi perairan Laut Natuna menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) pada tanggal 8 Januari 2020. Sehingga dalam mengatasi keamanan maritim pun diperlukan pula perubahan yang sesuai mengikuti perubahan arah lingkungan strategis negara sekitar (Sulaiman, 2019).

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya sendiri, melihat dari sudut pandang, faktor atau *background* pendidikan dan lingkungan pemimpinpun mempengaruhi arah kebijakan yang akan dibuat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tentu memiliki kalkulasi untung rugi untuk kepentingan negaranya dan tentu dipengaruhi juga oleh pemimpin yang menjabat pada saat itu. Ir.H. Joko Widodo¹ adalah Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 dan kembali terpilih pada 2019 tetapi kali ini didampingi oleh Ma'ruf Amien sebagai wakil presidennya (Adiguna, 2013).

Sebelum kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh Jokowi, kebijakan pertahanan dari masa sebelum Orde Baru dan setelah Orde Baru mengalami beberapa perubahan, namun tidak berubah total sepenuhnya (Mietzner, 2006). Hal tersebut pula terlihat pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pembaharuan alutsista SBY merujuk pada standar minimum yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya atau yang lebih sering kita dengar dengan *Revolution in Military Affairs* (RMA) (Posen, 1984).

Implementasi *Revolution in Military Affairs* (RMA) merupakan sebuah kebijakan pertahanan yang dibuat pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai standar minimum kekuatan penyokong yang harus dimiliki pada tubuh Tentara Nasional Indonesia guna tercapainya fungsi TNI untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman negara luar yang dianggap dapat mengganggu. Dimana berfokus pada pembaharuan atau modernisasi alutsista guna memajukan pula ilmu teknologi dan industri pertahanan negara Indonesia (Posen, 1984).

Selain itu pula letak Asia Tenggara yang strategis telah menjadikan negara-negara sekitar saling berlomba dalam pembaharuan baik segi militer dan alat-alat perang sehingga hal tersebut menjadikannya bentuk dari implementasi *balance of power* itu sendiri. Sehingga kemajuan alat tempur baik dari tempur udara yang mampu melintasi seluruh wilayah Indonesia, menjadikannya sebuah ancaman oleh Indonesia. Sehingga Indonesia pada masa Menteri Pertahanan Prabowo pula berencana memperbaharui pesawat tempur dengan pembelian 100 pesawat tempur milik AS baik seri F-15, F-18 dan F-35 . Hal tersebut pula sama pada armada laut negara tetangga yang memiliki kemampuan samudera (*blue water navy*) yang bukan hanya mampu beroperasi di perairan teritorialnya (*green water navy*) tetapi juga mampu menjadikannya salah satu faktor negara

¹ Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 58 tahun

Indonesia untuk memperkuat kebijakan pertahanan dari masa sebelum pemerintahan Jokowi sampai pada kebijakan era Jokowi sekarang ini (Wolfe, 1990, pp. 86-89).

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono kekuatan sipil dan militer masih berperan penuh pada kebijakan mengenai pokok minimum kekuatan militer (MEF) sebagai alat pertahanan negara. Dimana pada kebijakan MEF sendiri masih dominannya pengaruh militer itu sendiri dalam pengambilan atau pembentukan sebuah kebijakan dengan DPR. Selain tentunya TNI, DPR dan Pemerintah saling bersinergi dalam pembuatan keputusan tersebut namun pada nyatanya tahun 2010 sampai 2014 pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem atau mekanisme *layering*² dimana perubahan secara radikal tidaklah memungkinkan. Kelemahan dari sistem *layering* itu sendiri ialah masih bersifat *status quo* sehingga masih rendahnya bentuk kepatuhan selain dari tubuh militer itu sendiri yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana korupsi dan kurang optimal dalam pembaharuan baik alutsista dan infrastruktur yang dibangun pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Putra, 2020).

Akhir 2008 kesiapan standar kekuatan yang dimiliki tubuh TNI masih diangka 68.85 % dalam kesiapan di matra darat, 27% matra laut, dan 78% matra udara. Hal tersebut masih dianggap jauh dari kondisi ideal. Data diatas menggambarkan masih jauhnya dari standar kesiapan tempur negara Indonesia hal tersebut berfaktor karna alat tempur hasil hibah negara luar sudah berusia tua. Sehingga hal tersebut menggambarkan relasi antara sipil-militer dalam kebijakan MEF dimasa depan, apabila hal ini terus mengalami stagnansi dimana masih kuatnya pengaruh militer didalamnya, maka sangat memungkinkan apabila sewaktu-waktu militer kembali ke ranah politik praktis dikemudiannya (Gunawan, 2017).

Kebijakan MEF merupakan faktor utama dalam pembangunan sistem dan kekuatan di Indonesia sehingga dalam kurun 20 tahun, sejak 2010-2024 kekuatan pokok minimum diperkirakan akan berhasil melampaui dari target yang ingin dicapai guna perlindungan kedaulatan dan keamanan dalam negeri dari ancaman luar yang nyata (Laut Cina Selatan dan Perairan Natuna) serta disegani di kawasan regional maupun internasional (Buzan, 1991, pp. 18-19).

² Mekanisme yang beroperasi dalam kondisi institusional yang menjadi ciri khas dalam konteks transisi demokrasi yaitu besarnya jumlah veto players dalam proses pengambilan keputusan di arena politik dan kecilnya ruang diskresi kebijakan dalam institusi yang dijadikan sebagai target perubahan.

Kebijakan Pertahanan dari pemimpin sebelumnya sudah menyelenggarakan kebijakan-kebijakan dalam pengupayaan modernisasi alutsista namun masih imbangnya kekuasaan dan pengaruh dari kesatuan TNI dalam penerapan kebijakan pertahanan Indonesia, sehingga dalam pengambilan keputusan elite pemerintah sipil (legislatif, eksekutif) yang menjabat pun kurang dianggap memiliki *power*, terlalu gegabah dalam keputusan pembelian alutsista dan penerimaan hibah yang dilakukan untuk pertahanan negara masih menjadi isu pertahanan Indonesia. Ditambah untuk mengukur kalkulasi perbandingan penerapan kebijakan pertahanan era SBY dengan Jokowi ialah, dalam RAPBN tahun 2012 dari Rp.47,5 triliun pada 2011 menjadi Rp.64,4 triliun pada 2012 atau naik 35 % hal tersebut merupakan upaya modernisasi, pengembangan, penggantian serta pemeliharaan alutsista, sangat penting untuk mewujudkan postur TNI dengan kemampuan penangkalan yang tinggi, dan kemampuan melaksanakan tugas operasional yang efektif (Antara, 2011).

Era kepemimpinan SBY pada pemberian dana guna mendukung MEF baik dari *bawah* sampai ke atas masih dianggap tidak terlaksana dengan baik dalam kurun 2005-2009. Dimana dengan persentase 40 % setiap tahunnya dan terus mengalami penurunan, seperti pada Renstra Haneg sebesar Rp. 404.123M dan didukung hanya Rp.150.586 M dimana mencapai hanya 37 %. Berikut diagram yang menggambarkan perjalanan anggaran pertahanan yang dikaitkan dengan kebutuhan Komponen Utama/TNI semenjak tahun 2005-2009 dan pemenuhan anggran dimulai tahun 2010 sebagai sistem indikator pemenuhan anggaran dan pemerintah (Kemhan, 2012).

PERJALANAN ANGGARAN PERTAHANAN
(ANTARA KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN)

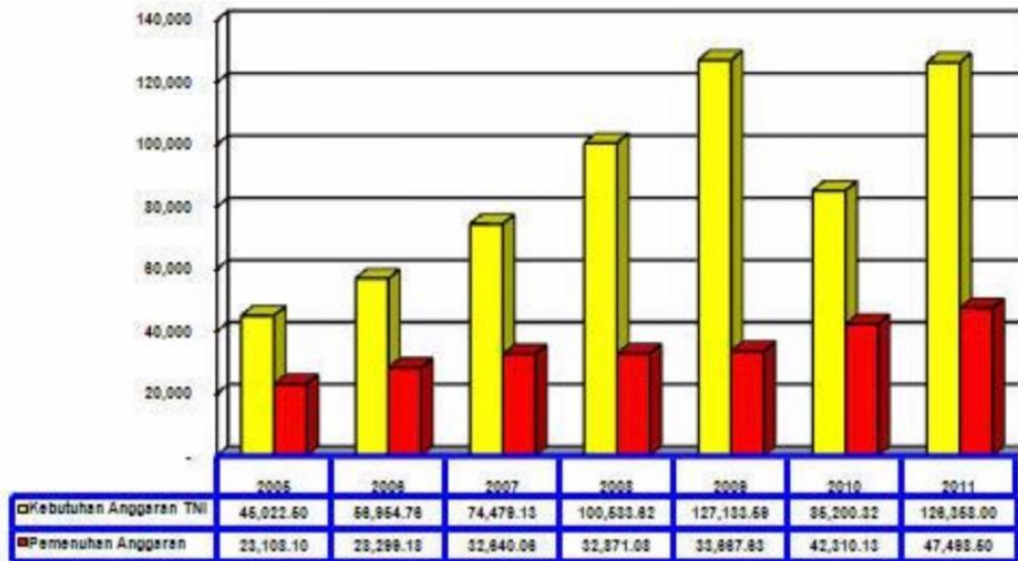


Diagram 1 : Perjalanan anggaran pertahanan.

Sumber : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Mengamati dari kebijakan pertahanan sebelumnya, Prioritas Kebijakan Pertahanan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kepemimpinan SBY hal tersebut dapat kita lihat pada pemberian prioritas guna pemenuhan alutsista dan terwujudnya MEF, selain itu pidato politik Jokowi tentang isu di Natuna dan kunjungan langsung ke Natuna merupakan bentuk keseriusan dalam menghadapi isu dengan Cina.

Dalam mewujudkan pertahanan guna pemenuhan MEF II berdasarkan data Kementerian Pertahanan(Kemenhan) dan Mabes TNI, capaian MEF terhadap Rencana Strategis (Renstra) terus mengalami peningkatan sejak 2014. Anggaran untuk pertahanan mengalami kenaikan dari Rp108,4 triliun tahun 2014 menjadi Rp127,42 triliun pada 2020. Kenaikan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan tempur maupun Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI. Anggaran pertahanan tersebut meningkat 17,53 persen dari APBN 2019 serta naik 16,25 persen dari outlook tahun lalu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 ditetapkan anggaran pertahanan sebesar Rp 108 triliun atau rata-rata naik sekitar 16,6 persen per tahun. Menurut fungsinya, anggaran pertahanan ini merupakan yang terbesar dibandingkan yang lainnya meskipun dibandingkan dengan APBNP 2016 sebenarnya mengalami penurunan sekitar 0,7 persen (Databoks, 2016).

Anggaran Kementerian Pertahanan tersebut juga merupakan yang terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya, meskipun Prabowo selaku Menteri Pertahanan terbaru tidak terlalu terbuka secara gamblang tentang kenaikan anggaran ini pastinya ia memiliki andil dalam peningkatan APBN di Kementerian Pertahanan. Persentase tersebut dapat membuktikan bahwa pada Era Kepemimpinan Jokowi Kebijakan Pertahanan lebih dijadikan prioritas dibandingkan Era SBY (Kemhan, 2012).

Isu pertahanan di Indonesia kini bukan hanya menjadi salah satu isu tren yang sering terjadi. Cina salah satu negara dengan perekonomian terkuat dianggap menjadi salah satu negara penyokong kemampuan ekonomi dan infrastruktur pada Indonesia. Mirisnya hal tersebut semakin membuat Indonesia bergantung terhadap Cina dalam beberapa tahun terakhir, ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh Cina di Indonesia sebagai bagian dari program *Belt and Road Initiatives* (BRI). Upaya membatasi ketergantungan terhadap Cina penting juga untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik Cina (Connelly, 2019).

Nilai utang Indonesia kepada Cina telah mencapai besaran yang cukup mengkhawatirkan, yaitu [US\\$ 17,75 miliar](#) pada 2019, atau meningkat 11% dibandingkan pada 2017. Hal ini membuat banyak ahli khawatir karena akan meningkatkan risiko Indonesia gagal bayar dan akhirnya 70% saham dipegang kembali oleh Cina seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Selain implikasi ekonomi, hal ini merambat pada dampak politik yang serius pula, hal tersebut dianggap Indonesia kesulitan untuk memberikan perlawanan yang tegas pada Cina yang semakin agresif di Laut Cina Selatan, seperti masuknya kapal asing Cina di perairan Indonesia (CNN, 2019).

Kedekatan Cina dengan Indonesia dan ketergantungan yang tinggi dianggap membahayakan Indonesia, dan Presiden Jokowi terlihat berhati-hati menyikapi ini. Faktor ekonomi dan agresifitas Cina membuat Jokowi tidak ingin terlalu dekat dengan pemerintahan Presiden Xi Jinping, tetapi pemerintah melihat sikap agresif China di perairan itu sebagai pertanyaan apakah kebangkitan negara tersebut akan terus berlangsung damai atau tidak (Fortuna, 2019).

Meski menyebabkan kekhawatiran, pemerintah menyatakan kedekatan dengan China tidak harus dipandang miring atau bahkan disalahartikan. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan bahwa Indonesia bersikap netral dalam bidang investasi ekonomi Cina dan menanggapi hal tersebut diperlukan. Indonesia berupaya bermain aman dalam menggambarkan ambivalensi yang mendalam terhadap China dan menghindari terlihat terlalu dekat dengan China. Indonesia tetap memiliki landasan hukum dan prinsip terkait dengan politik luar negeri dan mekanisme proses pemerintahan yang tidak tunduk atau diintervensi pihak asing. Indonesia berhubungan secara terhormat dengan negara manapun, tidak pernah inferior. Politik luar negeri Indonesia tetap di jalur bebas aktif dengan kemandirian untuk mengambil sikap (Sukanto, 2020).

Sikap yang cukup tegas dilakukan Indonesia dalam menyikapi kapal asing Cina di perairan Natuna menyebabkan kelunakan oleh Cina, yang memberikan pernyataan bahwa diharapkan hubungan bilateral dan kerjasama baik di bidang ekonomi dapat terus berjalan. Hal ini karena Indonesia memegang posisi kunci yang sangat strategis dalam implementasi BRI dan Cina membutuhkan Indonesia untuk proyek ambisius milik Cina tersebut yang harus melewati wilayah maritim Indonesia dan Cina dianggap tidak dapat merampungkan proyek tersebut tanpa melibatkan Indonesia (CNN, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin melihat mengapa pada Era Jokowi menjadikan kebijakan pertahanan sebagai prioritas dan perbedaan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya (SBY) dalam penerapan kebijakan pertahanan. Prioritas yang dilakukan Jokowi dalam porsi Kebijakan Pertahanan merupakan salah satu bentuk pertahanan kedaulatan karena adanya masalah atau GAP dan faktor-faktor dibaliknya menarik untuk dikaji, karena sejauh ini pembahasan mengenai prioritas pertahanan dan kedaulatan di Indonesia pada kepemimpinan Jokowi masih minimnya menelaah tentang perubahan prioritas dalam pembuatan kebijakannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah penelitian ini adalah **Mengapa Kebijakan Pertahanan Menjadi Prioritas Utama Jokowi dalam Mempertahankan NKRI tahun 2014-2020?**

C. Literature Review

Untuk menjawab pertanyaan tentang prioritas kebijakan pertahanan Era Jokowi 2014-2020, maka penulis akan mereview beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia sebagai berikut:

No	Penulis	Judul dan Tahun Terbit	Pendapat
1	Aditya Batara Gunawan	Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru	Distribusi persamaan kekuasaan sipil dan militer di area kebijakan transisi demokrasi yang terkait langsung dengan fungsi pokok militer. Yakni pertahanan negara menjadi bentuk kelemahan dan apabila stabilitas politik memburuk, militer dapat sewaktu-waktu kembali ke ranah politik praktis (Gunawan, Aditya Batara, 2017).
2	Jerry Indrawan	Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim.	Laut sebagai pertahanan dan keamanan negara yang pertama terjadi sehingga diperlunya perubahan pertahanan dari teritori ke pertahanan maritim (Indrawan, Jerry, 2015).
3	Wira (Media Komunikasi Kementrian Pertahanan)	KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018 (EDISI JANUARI-FEBRUARI 2018 VOLUME 70/ NOMOR 54)	Terlaksananya pengerahan kekuatan darat dengan didukung kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengamanan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/ terdapan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung eksistensi kedaulatan negara (WIRA, 2018).
4	E.Estu Prabowo	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN	kebijakan dan strategi pertahanan belum sejalan dengan kebijakan luar negeri yang memberikan

		INDONESIA (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan)	perhatian khusus pada dinamika kawasan Asia Tenggara, termasuk di Laut Cina Selatan. Disamping itu, kebijakan dan strategi pertahanan terkini belum memberikan perhatian pada dinamika konflik Laut Cina Selatan (Prabowo E. E., 2013).
5	Denik Iswardani	TINJAUAN TEORITIS KONSEPSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI ERA GLOBALISASI INDUSTRI PERTAHANAN	Evolusi industry pertahanan dan ancaman baru mengalami perubahan melalui transformasi ekonomi, peperangan jejaring, profesionalisme spesialis, <i>outsourcing</i> , sentralistik, menyebabkan banyaknya peperangan baru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Iswardani, 2015)
6	Letjen TNI Bambang Darmono	KONSEP DAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL INDONESIA	Perlu adanya konsep keamanan nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 guna menyusun sistem keamanan Negara, Publik dan Warga Negara Indonesia (Darmono, 2010).
7	Ahmad Jazuli	PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DEMI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : KEWIBAWAAN SUATU NEGARA	Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan memiliki keterkaitan dalam penegakan hukum diindikasikan oleh banyaknya pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi Indonesia (Jazuli, 2016).
8	Chairil Nur Siregar	ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA)	Adanya tiga ancaman di bidang pertahanan, ekonomi dan ideologi. Dianggap karena kurangnya keseriusan Indonesia dalam memperketat sistem pengawasan pertahanan, dan pemenuhan ekonomi yang menyebabkan puluturnya rasa nasionalisme warga di sana (Siregar, 2019).
9	UIN SUSKA RIAU	TINJAUAN UMUM KONSEP PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA	Berdasarkan tugas pokok TNI ialah sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dengan pembagian kewenangan menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI (SUSKA).

10	Totok Sudjatmiko	KEAMANAN NEGARA DALAM KEGIATAN ANTARIKSA NASIONAL: PERSPEKTIF REALIS OFENSIF	Perlunya cerminan dalam UU tentang Keantariksaan dan kemandirian ditinjau dari kebijakan luar negeri realis ofensif dalam menjaga keamanan nasional (Sudjatmiko).
11	Marthsian Yeksi Anakotta	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA LEGAL SYSTEM SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME	Perlunya pembangunan sistem keamanan menggunakan <i>legal system</i> hukum dalam menanggulangi kejahatan terorisme dan ancaman keamanan lainnya (Anakotta, 2020).
12	Jerry Indrawan	ANCAMAN NON-MILITER TERHADAP KEAMANAN NASIONAL DI PAPUA	Ancaman di Papua dalam kegiatan separatisme dapat menjadi ancaman keamanan nasional apabila tidak ditindak lanjuti dengan serius (Indrawan, 2016)
13	Prof. Anak Agung Perwita Banyu	DINAMIKA KEAMANAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA	Konsep keamanan yang komprehensif menghasilkan keamanan tidak hanya oleh komponen militer semata, bisa dihasilkan beragam aktor negara maupun non negara, hasil interaksi independen kebijakan baik lokal dan regional dan global, agenda keamanan bersifat majemuk (Perwita, 2008).
14	Adi Rio Arianto	MEMBANGUN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL INDONESIA GUNA MENGHADAPI ANCAMAN SIBER GLOBAL MELALUI INDONESIA SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM ON INTERNET INFRASTRUCTURE (ID-SIRTII)	Sudah saatnya Indonesia membangun Angkatan Siber sebagai pelengkap dari AD,AL dan AU guna menjaga stabilitas informasi, perlindungan siber dan segala bentuk ancamannya (Arianto, 2019).
15	Fadhil Alghifari	ANALISIS TEORI OFFENSE-DEFENSE TERHADAP REFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DALAM DINAMIKA	Jepang memainkan peran kunci dalam keseimbangan keamanan di Asia Timur dengan menggunakan teori offense-defense; doktrin dan teknologi militer, pertimbangan geografis, tatanan sosial dan politik

	KEAMANAN DI ASIA TIMUR	serta tatanan diplomatik (Alghifari, 2016).
--	---------------------------	---

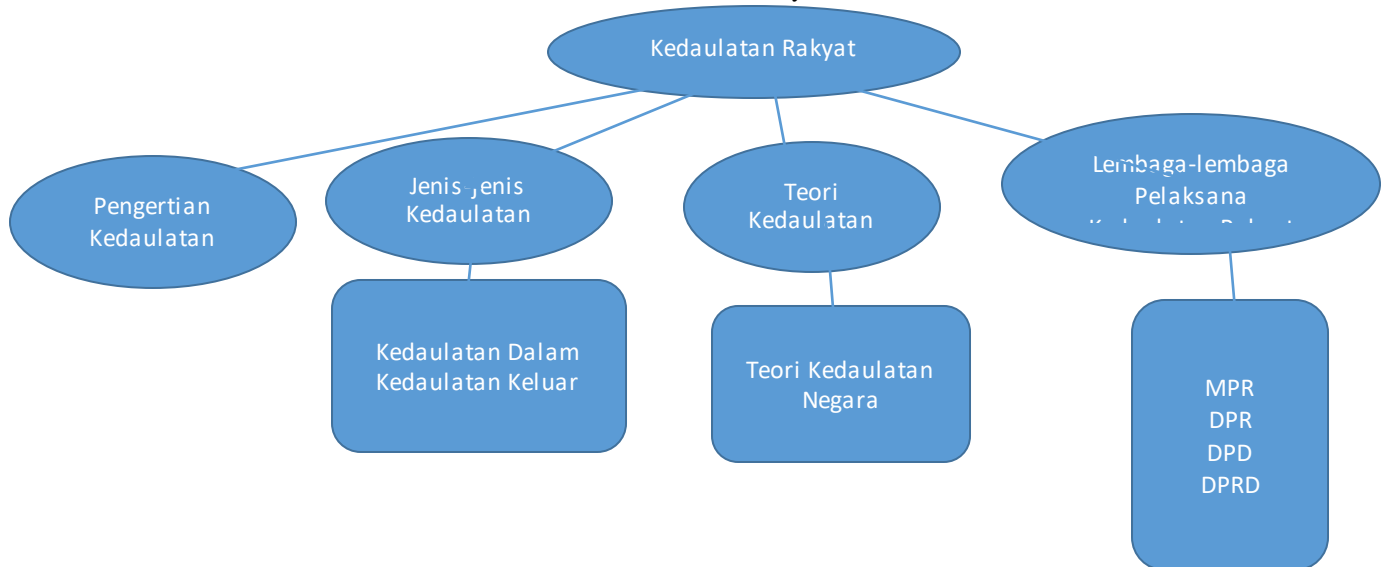
Berdasarkan literature review yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan penelitian yang beragam mengenai kebijakan pertahanan Indonesia dalam pertahanan kedaulatan. Kesamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang kebijakan pertahanan itu sendiri dan indikasinya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dan perspektif penelitian. Peneliti ingin memfokuskan pada peran *sovereignty*, keamanan dan *balanced of power* dalam kebijakan pertahanan kedaulatan dari ancaman luar yang dijadikan prioritas.

D. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka teori yang dapat kita gunakan untuk meneliti tesis ini adalah :

1. Teori Kedaulatan Negara (Jean Bodin) & *Security* (Paul D. William)

Ilustrasi 1.1 Kedaulatan Rakyat



a) *Sovereignty* atau kedaulatan suatu negara merupakan teori yang menjelaskan kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur seluruh wilayah teritori dan masyarakatnya dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tersebut. Dimana kekuasaan itu bersifat absolut tidak dapat

diganggu oleh siapapun bahkan negara luar sekalipun tidak dapat mengintervensinya. Hal tersebut lebih dikenal dengan sebutan kedaulatan kedalam (*Interne Souvereiniteit*) dan kedaulatan keluar (*Externe Souvereiniteit* (Bodin, 1576)) ialah negara mampu dan boleh melakukan hubungan bilateral dan kerjasama dengan negara luar membentuk aliansi guna untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Pengertian kedaulatan tersebut dikemukakan oleh Jean Bodin (Mauna, 2020).

Phillip Allot berpendapat *Sovereignty is not a fact but a theory*. Dimana teori ini bersifat dinamis melihat arah perkembangan dunia internasional dari waktu ke waktu. Sehingga kemunculan (*the pride of nations*) atau harga diri bangsa tergantung pada negara tersebut. Seperti pada contoh yang terjadi di Asia Tenggara dimana negara sekitar seperti Singapura dan Malaysia yang waktu itu terus melakukan pembaharuan alutsista, membuat Indonesia melakukan tindakan pembaharuan alutsista pula seperti pembuatan Kapal Selam dengan bekerja sama antara PT PAL dan Korea Selatan (Allof, 2001).

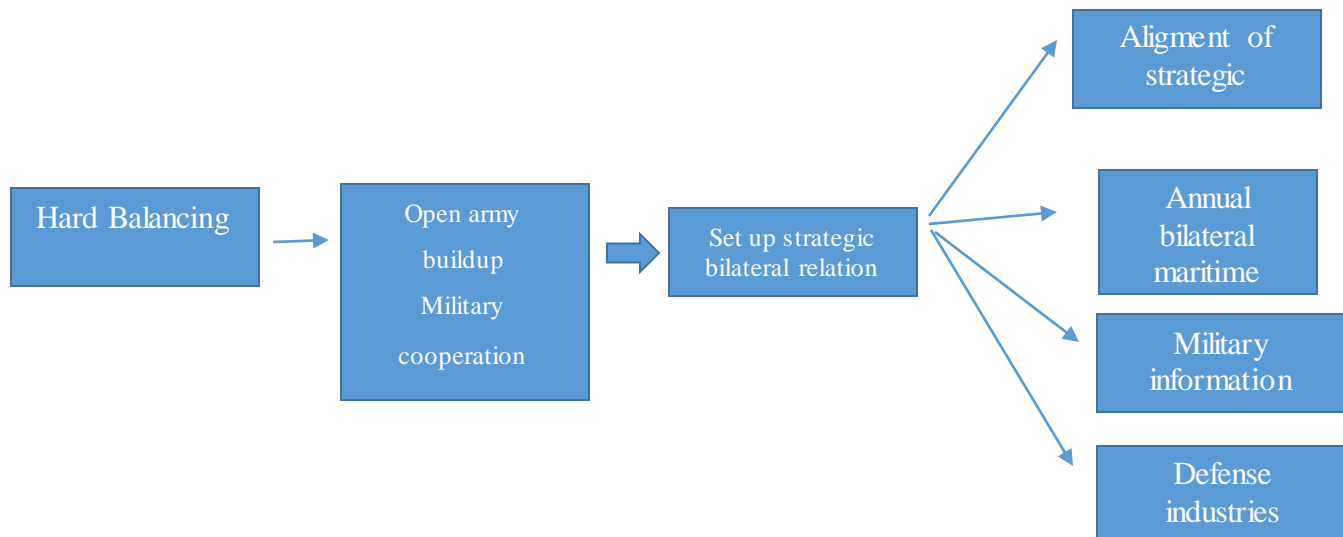
Seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia dimana melihat alat dan fasilitas pertahanan di negara sekitar yang sudah semakin maju menjadikan giat Indonesia untuk memperbaharui alutsista dan sudah mulai digerakan di zaman SBY namun masih ada hambatan-hambatan sehingga proses tersebut kurang optimal. Ditambah dengan pergantian kepemimpinan menjadi kebijakan pertahanan pun ikut berubah, dimanapun pengoptimalan di era Jokowi banyak pertimbangan dan pembelian alutsista harus ada kalkulasi untung rugi dan dijadikan investasi keamanan di masa depan. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu membuat suatu keputusan akhir tanpa dipengaruhi pihak atau otoritas lain serta memperjuangkannya. Sehingga semakin baik suatu Negara menjalankan dan mempertahankan kedaulatannya maka semakin tinggilah harga diri negara tersebut (Buana, 2007).

b) *Security* atau keamanan (Paul D. William) para sarjana Hubungan Internasional berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah "*contested concept*". Pendekatan tradisional yang didominasi oleh mashab Realisme menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari seangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal (Haftendorn, 1991).

2. Teori Balanced of Power

Ilustrasi 1.2 ACT OF BALANCING

Act of Balancing Maritime Security Cooperation Indo-USA-Korsel Implementation



Balanced of Power atau keseimbangan kekuasaan merupakan suatu kajian teori dalam Hubungan Internasional yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekuasaan agar mencegah salah satu negara menjadi paling kuat (*dominan*) bagi negara lain (Kasanopha, 2020).

Balance of Power merupakan bentuk usaha yang dilakukan suatu negara untuk penyeimbangan kekuatan dari negara-negara yang ia anggap mengancam. Hal tersebut muncul karena menganggap negara lain lebih kuat bahkan membentuk kekuatan poros sendiri dengan membentuk dengan negara-negara aliansi lainnya. Sehingga negara tersebut guna melindungi negara nya sendiri pula melakukan pengoptimalan kekuatan dengan cara meningkatkan sistem pertahanan dan membentuk aliansi negara-negara kuat lainnya. (Sheehan, 1996).

Dalam proses kedaulatan keluar, negara mampu mengadakan bentuk hubungan luar negeri dan pertahanan diri jika terdapat ancaman dari luar baik berupa bentuk penyetaraan kekuatan atau *balance of power* dengan pemberian prioritas. Adapun berikut alasan penyetaraan kekuatan pertahanan dijadikan prioritas dalam menjaga kedaulatan dikarenakan :

-Penjagaan kedaulatan NKRI dari faktor lingkungan internasional sebagai upaya pencegahan dan persiapan ancaman dari luar.

-Ketertinggalan alat dan fasilitas pertahan di lingkungan internasional menjadikan alasan prioritas kemandirian dengan modernisasi alat dan teknologi alutsista sebagai bagian bentuk dari *pride* atau gengsi dikawasan Asia Tenggara maupun Pasifik.

Hal tersebut dapat dibentuk dengan *Hard Balancing* dan *Soft Balancing*.. Dimana hal tersebut merupakan bentuk strategi suatu negara mengoptimalkan kekuatan militer, pertahanan dan kemandiriannya guna menyaingi negara yang ia anggap menjadi ancaman. Selain itu *Soft Balancing* merupakan tindakan pengoptimalan kekuatan secara diam-diam dengan mengajak negara-negara lainnya membentuk aliansi, hal tersebut baik dari wilayah regional sekitar bahkan secara global. *Soft Balancing* sewaktu-waktu dapat berubah menjadi *Hard Balancing* apabila negara sekitar yang dianggap mengancam mulai melakukan pengoptimalan kekuatan secara terang-terangan dan mulai mengancam (T.V. Paul, 2004).

Melihat dari teori tersebut merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan keamanan wilayah teritorialnya dari ancaman luar. Maraknya negara sekitar dalam pembaharuan alutsista negara mereka membuat Indonesia melakukan tindakan yang serupa dimana dengan pengembangan kekuatan ini dikiranya merupakan suatu *pride* dan gengsi Indonesia terhadap negara sekitar dan dapat menangkal atau kesiapan apabila terjadi konflik sewaktu-waktu dapat bertindak dengan sigap. Ditambah dengan konflik nyata pada Laut China Selatan dan beberapa kali kapal-kapal China yang memasuki wilayah perairan Indonesia sehari-hari membuat akhirnya Jokowi turun tangan dan terjun langsung ke lapangan dengan mengelilingi lautan di Natuna menggunakan kapal KRI Angkatan Laut merupakan tindakan nyata bahwa wilayah perairan tersebut masih di dalam wilayah perairan NKRI.

E. Hipotesa

Berikut ini beberapa hipotesa prioritas Kebijakan Pertahanan digunakan dalam mempertahankan Kedaulatan NKRI di Era Jokowi:

1. Jokowi merasa adanya ancaman dari luar, baik konflik Laut China Selatan dan masuknya kapal China ke perairan Indonesia di Natuna.
2. Modernisasi alat-alat alutsista oleh negara-negara sekitar Indonesia yang memantik Indonesia melakukan tindakan *balanced of power* dengan melakukan modernisasi teknologi alutsista dan kerjasama bilateral dibidang maritim, informasi militer dan pertahanan militer merupakan implikasi Realisme.
3. Adanya faktor internal lingkungan politik Jokowi yang merupakan mantan petinggi militer.

F. Metode Penelitian

Menurut Michael Patton dan Michael Cohran penelitian kualitatif memiliki tujuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial dan menghasilkan frasa sebagai data untuk dianalisis. Sedangkan menurut Susan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang condong ke eksplorasi. Penelitian ini digunakan agar dapat memahami mengenai alasan, pendapat serta motivasi yang mendasari suatu tindakan. Metode kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Laporan penelitian ini bersifat deskriptif dan naratif (Michael, 2013).

Penelitian ini adalah upaya untuk menganalisa motif prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi dalam mempertahankan kedaulatan NKRI implikasi mempertahankan kedaulatan sebagai variable independen yang mempengaruhi kebijakan pertahanan era Jokowi periode ke 2 sebagai variable dependen. Respon pemerintah Indonesia terhadap permasalahan ancaman kedaulatan ini dengan melakukan upaya realisme serta melihat sejauhmana upaya realisme ini berimplikasi terhadap ancaman kedaulatan itu sendiri. Sebagai sebuah penelitian yang bersifat ilmiah, maka dalam penulisan penelitian ini akan lebih di fokuskan pada penggunaan metode penelitian kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mencari data pustaka, *library research* dan mencari sejumlah *literature* yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau deskriptif yaitu dengan melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi sebelum pembuatan prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi, data yang dibutuhkan oleh penulis adalah data yang berkaitan dengan penelitian tentang motif prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi dalam mempertahankan kedaulatan NKRI tahun 2014-2020.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada motif prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi dalam mempertahankan kedaulatan NKRI tahun 2014-2020. Skala waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak tahun 2014 bermula pada saat Jokowi menjabat Presiden di periode pertama, dimana menggambarkan fluktuasi prioritas kebijakan pertahanan. Setelah itu pula pada masa jabatan periode kedua dalam kurun waktu yang dilihat yaitu dari akhir 2019- awal 2020. Namun kurun waktu sebelum inipun masih dianggap relevan untuk menjadi salah satu bahan acuan dinamika kebijakan pertahanan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab berikutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab 1, merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Dinamika Pertahanan dan Keamanan Indonesia, Penjelasan arah kebijakan pertahanan Jokowi dari periode pertama dan kedua dan perbandingannya dengan Pemimpin sebelumnya, perbandingan sektor lain pada 2020 sehingga dijadikan prioritas.

Bab III, , Alasan Prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi dari 2014-2020, kerjasama dengan militer USA, Korsel dan Australia dalam kebijakan pertahanan menjaga kedaulatan Indonesia, modernisasi alat alutsista Indonesia dari negara-negara luar (USA, Korsel) dan Dirgantara Indonesia dan bentuk diplomasi pertahanan Prabowo sebagai indikasi internal penyebab kenaikan prioritas kebijakan pertahanan.

Ancaman Kedaulatan NKRI; Kebangkitan China, Laut China Selatan, Kapal China di Perairan Natuna, persaingan modernisasi alutsista negara sekitar penyebab bermulanya *balanced of power* dan pertahanan kedaulatan oleh Jokowi.

Bab IV, Ancaman Kedaulatan NKRI; Kebangkitan China, Laut China Selatan, Kapal China di Perairan Natuna, persaingan modernisasi alutsista negara sekitar penyebab bermulanya *balanced of power* dan pertahanan kedaulatan oleh Jokowi.

Bab V, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.